



WELFARE

JURNAL ILMU EKONOMI

VOLUME 7 NOMOR 1 (MEI 2026)

<http://jurnal.unsil.ac.id/index.php/welfare>

ISSN 2723-2212 (MEDIA ONLINE)

ISSN 2723-2220 (MEDIA CETAK)

PENGARUH FINANCIAL DEEPENING TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI INDONESIA (STUDI DATA PANEL PROVINSI 2011-2024)

Nanda Riswana^{a*}

^aIPB University, Bogor, Jawa Barat, Indonesia

*nandariswanaa@gmail.com

Diterima: Januari 2026. **Disetujui:** April 2026. **Dipublikasikan:** Mei 2026.

ABSTRACT

This study aims to analyze the influence of financial deepening (credit/GRDP ratio), economic growth, and inflation on poverty levels in Indonesia. Given the challenge of regional welfare disparity, this research employs a quantitative approach using static panel data regression across 33 provinces in Indonesia from 2011 to 2024. The Random Effect Model (REM) with Cluster Robust Standard Errors correction was selected as the best estimation model to address autocorrelation and heteroscedasticity issues. Empirical findings demonstrate that financial deepening has a significant negative effect on poverty, indicating that access to banking credit is effective in reducing poverty rates. Conversely, inflation has a significant positive effect, meaning that price increases directly worsen poverty by eroding purchasing power. Meanwhile, economic growth was found to have no significant effect on poverty reduction, indicating a weak trickle-down effect due to non-inclusive growth. The implications of this study highlight the need for financial inclusion strategies targeted at labor-intensive productive sectors and strict regional inflation control to accelerate poverty alleviation.

Keywords: *Financial Deepening, Poverty, Economic Growth, Inflation.*

ABSTRAK

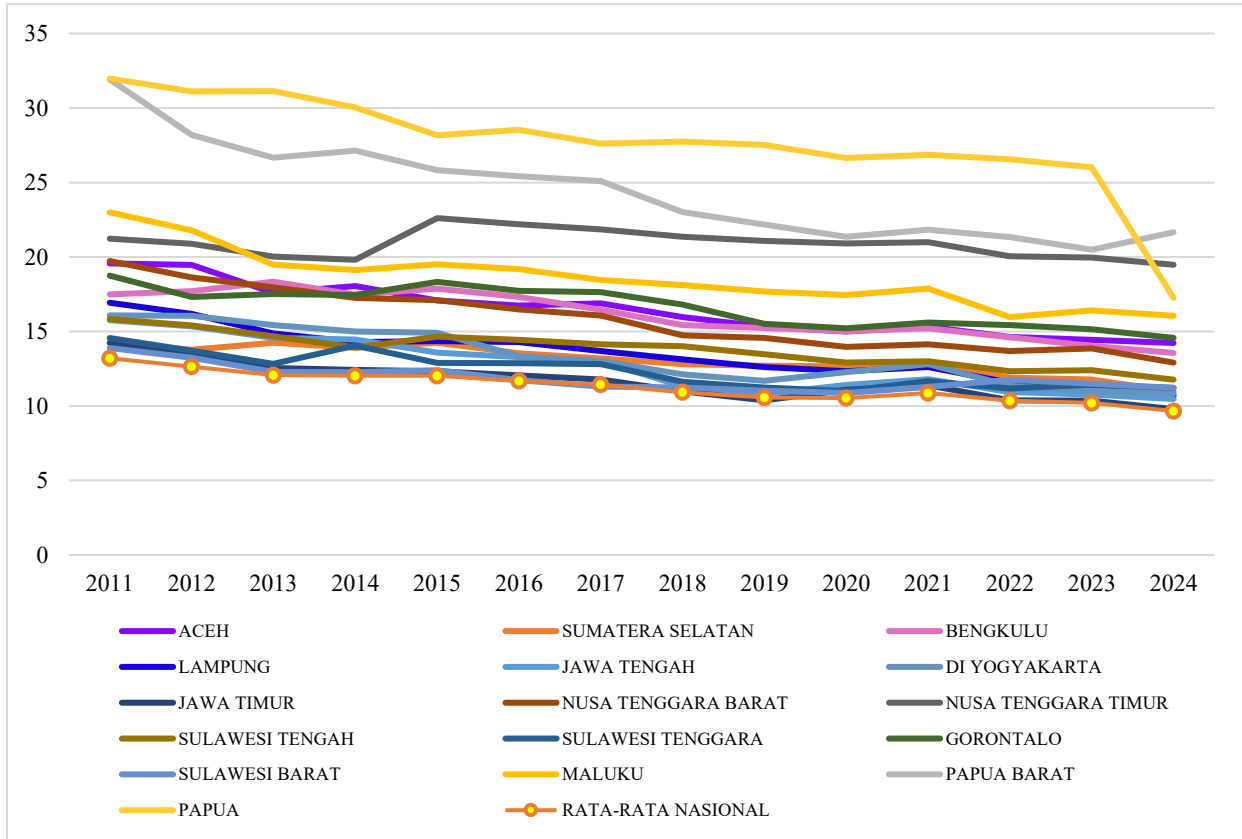
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *financial deepening* (rasio kredit/PDRB), pertumbuhan ekonomi, dan inflasi terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Mengingat tantangan disparitas kesejahteraan antarwilayah, studi ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan regresi data panel statis pada 33 provinsi di Indonesia selama periode 2011–2024. Model estimasi terbaik yang dipilih adalah *Random Effect Model* (REM) dengan koreksi *Cluster Robust Standard Errors* untuk mengatasi masalah autokorelasi dan heteroskedastisitas. Temuan empiris menunjukkan bahwa *financial deepening* memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, yang mengindikasikan bahwa akses kredit perbankan efektif dalam mereduksi kemiskinan. Sebaliknya, inflasi berpengaruh positif dan signifikan, yang berarti kenaikan harga secara langsung memperburuk tingkat kemiskinan dengan menggerus daya beli masyarakat. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi ditemukan tidak berpengaruh signifikan terhadap penurunan kemiskinan, mengindikasikan lemahnya efek menetes ke bawah (*trickle-down effect*) akibat pertumbuhan yang kurang inklusif. Implikasi dari penelitian ini menekankan perlunya strategi inklusi keuangan yang lebih terarah pada sektor produktif padat karya dan pengendalian inflasi daerah yang ketat untuk mempercepat pengentasan kemiskinan.

Kata Kunci: Financial Deepening, Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi.

I. PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan tantangan multidimensi yang terus menjadi fokus utama dalam agenda pembangunan ekonomi. Meskipun pencapaian agregat nasional sering

kali diklaim membaik, angka tersebut acap kali bersifat semu dan menutupi realitas ketimpangan spasial yang tajam antarwilayah.



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah oleh penulis (2026)

Gambar 1. Tingkat Kemiskinan 16 Provinsi di Atas Angka Rata-Rata Nasional (2011–2024)

Berdasarkan rata-rata tingkat kemiskinan selama periode 2011–2024, batas aman rata-rata nasional berada pada level 9,66%. Namun, realitasnya terdapat 16 provinsi hampir separuh wilayah Indonesia yang secara persisten mencatatkan tingkat kemiskinan di atas batas rata-rata tersebut. Kawasan Timur Indonesia, khususnya Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku, menjadi episentrum kemiskinan terdalam dengan persentase menembus dua digit. Dimensi kemiskinan yang ekstrem ini sangat dipengaruhi oleh karakteristik wilayah serta inklusivitas infrastruktur ekonomi (Ekaputri et al., 2025). Fenomena disparitas persisten ini menuntut solusi makroekonomi struktural, salah satunya melalui optimalisasi sektor keuangan.

Salah satu instrumen makroekonomi yang secara fundamental diyakini mampu mengakselerasi kesejahteraan masyarakat adalah pendalaman sektor keuangan atau *financial deepening*. Secara teoritis, sektor keuangan yang dalam dan matang berfungsi strategis untuk memobilisasi tabungan masyarakat agar dapat disalurkan menjadi investasi yang produktif. Proses intermediasi ini pada gilirannya akan menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan kapasitas pendapatan bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Studi lintas negara yang dilakukan oleh Sugiyanto dan Yolanda (2020) mengonfirmasi bahwa *financial deepening* mampu memacu pertumbuhan ekonomi sekaligus mereduksi ketimpangan

pendapatan dan angka kemiskinan secara signifikan, terutama di negara-negara berkembang. Hal ini mengindikasikan bahwa inklusi ke dalam sistem ekonomi formal memperbesar peluang masyarakat miskin untuk keluar dari jerat kemiskinan. Namun, implementasi teori ini ternyata terhambat oleh kondisi geografis dan struktural di Indonesia.

Dalam konteks regional Indonesia, disparitas infrastruktur keuangan antarwilayah masih menjadi hambatan utama dalam pengentasan kemiskinan. Provinsi-provinsi di Kawasan Timur Indonesia (KTI) yang memiliki tingkat kemiskinan ekstrem terbukti memiliki tingkat kedalaman keuangan yang paling rendah dibandingkan dengan Pulau Jawa. Fakhru Rizqi dan Nuraulia (2025) menegaskan bahwa ketimpangan akses dan infrastruktur keuangan ini berkorelasi lurus dengan lambatnya penurunan angka kemiskinan di wilayah-wilayah tertinggal. Kondisi heterogenitas ini membuktikan bahwa kebijakan inklusi keuangan yang bersifat *one-for-all* atau pukul rata secara nasional terbukti tidak efektif karena mengabaikan realitas spasial. Setyani dan Sugiarto (2021) juga menambahkan bahwa faktor lokasi geografis sangat memengaruhi efektivitas transmisi kebijakan makroekonomi terhadap kesejahteraan multidimensi. Oleh karena itu, peran sentral dalam mengatasi kesenjangan struktural ini seharusnya dipegang oleh perbankan melalui ekspansi kredit yang lebih inklusif.

Sektor perbankan memegang peranan sentral dalam menyalurkan likuiditas ke sektor riil melalui pemberian kredit, di mana rasio kredit terhadap PDRB sering digunakan sebagai proksi utama kedalaman keuangan. Menurut Astutik dan Nugroho (2024), ekspansi kredit secara teori memiliki kausalitas kuat dengan pertumbuhan ekonomi yang mengarah pada pengurangan kemiskinan. Namun, realitas empiris di Indonesia menunjukkan sebuah paradoks. Meskipun secara agregat rasio kredit perbankan terus meningkat, distribusi pembiayaan tersebut sering kali bias dan lebih banyak dinikmati oleh korporasi besar atau dialokasikan untuk sektor konsumtif. Akibatnya, dampak dari tingginya rasio kredit

terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat lapisan bawah masih sangat dipertanyakan efektivitasnya. Di samping masalah distribusi kredit yang asimetris, kelompok masyarakat prasejahtera di 16 provinsi rentan tersebut juga sangat terancam oleh guncangan makroekonomi lainnya, yaitu inflasi.

Stabilitas makroekonomi yang tercermin dari tingkat inflasi merupakan faktor penentu yang berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat miskin. Inflasi beroperasi sebagai instrumen regresif yang mendepresiasi nilai riil pendapatan kelompok rentan secara cepat. Ketika terjadi guncangan harga, khususnya pada komoditas kebutuhan pokok pangan (*volatile food*), standar garis kemiskinan akan otomatis terkerek naik. Konsekuensinya, tekanan inflasi yang tidak terkendali akan mendorong penduduk yang sebelumnya berada sedikit di atas batas rentan untuk langsung terperosok ke bawah garis kemiskinan. Susanto dan Pangesti (2020) mengonfirmasi bahwa lonjakan inflasi memiliki dampak negatif seketika terhadap tingkat kesejahteraan, di mana kenaikan harga barang langsung melumpuhkan kemampuan konsumsi masyarakat kelas bawah. Lebih jauh, dinamika inflasi ini tidak hanya memukul kapasitas daya beli masyarakat secara langsung, tetapi juga memengaruhi efektivitas transmisi kebijakan sektor keuangan.

Stabilitas harga memiliki peran esensial sebagai prasyarat keberhasilan kebijakan sektor keuangan dalam mengentaskan kemiskinan. Tingkat inflasi yang terlampaui tinggi berpotensi menetralkan atau bahkan menghancurkan seluruh keuntungan ekonomi yang telah dicapai melalui ekspansi kredit dan pertumbuhan pendapatan daerah. Miranda dan Rafiqi (2025) menyoroti bahwa inflasi tidak hanya berdiri sendiri sebagai beban bagi masyarakat, tetapi juga bertindak sebagai variabel moderasi krusial yang mendistorsi kinerja perbankan serta kualitas *financial deepening*. Ketidakpastian akibat inflasi akan membuat perbankan enggan menyalurkan kredit ke sektor UMKM dan masyarakat miskin karena meningkatnya risiko kredit macet (*non-*

performing loan). Oleh karena itu, pengujian model makroekonomi mengenai pendalaman keuangan wajib menyertakan inflasi sebagai variabel kontrol untuk mencegah estimasi yang bias. Hal ini membawa analisis pada elemen makro fundamental lainnya: Pertumbuhan Ekonomi (PDRB).

Pertumbuhan ekonomi daerah (PDRB) secara konvensional diasumsikan mampu menciptakan mekanisme *trickle-down effect* yang mendistribusikan kesejahteraan ke seluruh lapisan masyarakat. Namun, kualitas pertumbuhan ekonomi di Indonesia, khususnya terkait kemampuannya mengakomodasi kelompok miskin (*pro-poor growth*), masih menjadi perdebatan serius. Sejumlah temuan empiris menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah acap kali bersifat padat modal (*capital-intensive*) daripada padat karya. Peningkatan PDRB di beberapa periode tidak memiliki pengaruh yang signifikan secara statistik terhadap penurunan kemiskinan. Sejalan dengan temuan tersebut, Kamsina dan Khoirudin (2024) juga membuktikan bahwa pertumbuhan PDRB per kapita di wilayah Nusa Tenggara Timur gagal memberikan dampak signifikan terhadap pengentasan kemiskinan. Oleh karena itu, pertumbuhan PDRB yang tinggi tanpa didukung oleh pendalaman finansial hingga ke level mikro tidak akan menyelesaikan masalah ketimpangan.

Aksesibilitas kredit bagi usaha mikro dan rumah tangga miskin sering kali terhalang oleh berbagai hambatan struktural, seperti ketatnya persyaratan agunan (*collateral*) dan rendahnya literasi keuangan di pedesaan. Nuryitmawan (2021) menjelaskan bahwa meskipun berbagai program kredit inklusif telah diluncurkan, dampaknya masih sangat bergantung pada karakteristik demografi dan profil risiko rumah tangga sasaran. Fenomena ini mengindikasikan bahwa tingginya rasio kredit perbankan terhadap PDRB di suatu provinsi sering kali mengalami bias perkotaan (*urban bias*). Dana pembiayaan cenderung terakumulasi secara eksklusif di pusat-pusat pertumbuhan ibu kota provinsi, namun sangat minim mengalir ke wilayah pinggiran. Padahal, Rizkiyah dan Nidar (2022)

menegaskan bahwa distribusi kredit melalui Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan UMKM seharusnya sangat krusial dalam menekan kemiskinan. Beragam fenomena paradoks dan asimetri distribusi inilah yang menyebabkan berbagai studi terdahulu memberikan hasil yang saling bertentangan.

Terdapat celah literatur (*research gap*) yang esensial untuk diinvestigasi lebih lanjut akibat perdebatan empiris yang belum konklusif terkait efektivitas *financial deepening* terhadap kemiskinan. Sebagian studi mengonfirmasi adanya dampak negatif yang signifikan, sementara penelitian lain justru menemukan hasil yang tidak relevan atau bahkan mengindikasikan peningkatan ketimpangan. Sipahutar et al. (2016) menemukan bahwa transmisi kredit perbankan terhadap pengurangan pengangguran dan kemiskinan bersifat kompleks serta membutuhkan jeda waktu (*lag*) agar dampaknya benar-benar terasa. Di sisi lain, Pasuhuk (2018) menyimpulkan bahwa kontribusi kedalaman finansial dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia belum optimal akibat terbatasnya aksesibilitas riil masyarakat bawah. Ketidakkonsistenan temuan-temuan akademis ini membuka ruang urgensi yang lebar bagi penelitian lanjutan untuk memvalidasi kembali teori intermediasi keuangan. Inkonsistensi empiris ini diduga kuat tidak lepas dari kelemahan pendekatan metodologi pada mayoritas penelitian terdahulu.

Kesenjangan penelitian berikutnya terletak pada bias metodologis dan keterbatasan cakupan wilayah analisis. Sebagian besar literatur terdahulu mendasarkan temuannya pada analisis runtun waktu (*time series*) agregat berskala nasional atau hanya berfokus pada studi kasus provinsi tunggal. Pendekatan semacam ini secara analitis terbukti gagal menangkap heterogenitas serta dinamika spasial antarwilayah (Pratama, 2020). Akibatnya, masalah ketimpangan ekstrem seperti yang dialami oleh 16 provinsi tertinggal menjadi tidak terdeteksi oleh model agregat. Meskipun Florennica dan Febriani (2023) telah menginisiasi penggunaan data panel provinsi untuk membedah pengaruh pengeluaran

pemerintah dan pendalaman keuangan, rentang observasinya masih sangat terbatas hingga tahun 2020. Studi ini dirancang khusus untuk mengisi kekosongan tersebut dengan mengaplikasikan pendekatan regresi spasial-panel komprehensif. Selain penyempurnaan metodologi panel, kebaruan lain dari penelitian ini juga terletak pada rentang waktu pengamatan yang ekstrem.

Kebaruan (*novelty*) utama dari penelitian ini terepresentasikan melalui pemanfaatan horizon waktu pengamatan yang panjang dan sangat terkini, yakni periode 2011 hingga 2024. Rentang waktu 14 tahun ini sangat krusial karena mencakup siklus ekonomi yang utuh: fase pertumbuhan stabil, guncangan kontraksi hebat akibat pandemi COVID-19, hingga transisi pemulihan ekonomi nasional. Aryati et al. (2023) mencatat bahwa syok pandemi telah mengubah arsitektur transmisi sektor keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi secara fundamental, baik dalam jangka pendek maupun panjang. Analisis empiris menggunakan dataset pasca-krisis (2021–2024) akan menguji secara konkret sejauh mana daya tahan (*resilience*) dan peran penyangga sektor keuangan mampu meredam lonjakan kemiskinan di era ketidakpastian. Untuk memastikan presisi analisis dalam mengukur ketahanan selama rentang waktu ekstrem tersebut, pemilihan proksi variabel makroekonomi menjadi sangat menentukan.

Secara spesifik, penelitian ini merumuskan variabel *finansial deepening* dengan memproxikannya melalui rasio total kredit yang disalurkan perbankan terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku. Keputusan penggunaan proksi kredit domestik ke sektor swasta ini didasarkan pada argumen akademis bahwa indikator tersebut secara presisi merepresentasikan efektivitas fungsi intermediasi perbankan ke sektor riil yang produktif. Pendekatan ini merupakan koreksi atas kelemahan banyak studi sebelumnya yang cenderung mencampuradukkan analisis dengan menggunakan indikator jumlah uang beredar atau *Broad Money* (M2), yang sifatnya sangat bias secara moneter (Permana dan Pasaribu, 2023). Dengan fokus ketat pada rasio kredit,

penelitian ini mampu mengisolasi secara empiris dampak pembiayaan perbankan langsung terhadap peningkatan kapasitas ekonomi riil masyarakat miskin. Melalui seluruh landasan fenomena empiris, paradoks lapangan, dan kesenjangan literatur tersebut, kerangka arah penelitian ini menjadi sangat terstruktur dan jelas.

Berdasarkan konstruksi latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dipaparkan, fokus utama studi ini diformulasikan untuk mengevaluasi secara mendalam determinan makroekonomi kemiskinan di Indonesia. Secara khusus, penelitian ini bertujuan mengestimasi besaran dan arah pengaruh dari pendalaman keuangan, pertumbuhan ekonomi, serta inflasi terhadap tingkat kemiskinan menggunakan regresi data panel statis pada 33 provinsi (2011–2024). Hasil estimasi kuantitatif dari studi ini diharapkan tidak hanya menutup celah literatur akademik, tetapi juga berkontribusi secara praktis. Konklusi yang dihasilkan ditujukan untuk memberikan rumusan kebijakan inklusi keuangan yang spesifik dan berpihak pada kelompok rentan (*pro-poor financial inclusion*). Dengan memfokuskan strategi pada stabilitas harga dan realokasi kredit produktif yang inklusif, kebijakan tersebut diharapkan mampu mengakselerasi konvergensi kesejahteraan, khususnya bagi belasan provinsi yang selama ini tertinggal dalam jebakan kemiskinan persisten.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif dengan memanfaatkan struktur data panel, yang mengintegrasikan data deret waktu (*time series*) selama periode 2011 hingga 2024 dengan data silang tempat (*cross-section*) yang mencakup 33 provinsi di Indonesia. Efisiensi estimasi dalam penelitian ini dicapai melalui penggunaan data panel, yang secara teknis mampu meningkatkan derajat kebebasan sekaligus meminimalisir masalah kolinearitas antarvariabel. Selain itu, Sitorus dan Yuliana (2018) menambahkan bahwa data panel mampu menangkap heterogenitas karakteristik unik setiap wilayah yang tidak dapat diamati. Guna menjamin validitas, akurasi, dan reliabilitas

analisis, seluruh data sekunder yang diekstraksi dalam riset ini merujuk pada rilis resmi dan baku yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Variabel terikat (Y) yang menjadi fokus utama dalam analisis ini adalah Tingkat Kemiskinan, yang dioperasionalkan menggunakan indikator *Headcount Indeks* (P0). Indikator ini menggambarkan proporsi populasi dengan rata-rata pengeluaran per kapita bulanan yang tidak mencapai ambang batas Garis Kemiskinan (GK). Mengacu pada metodologi Badan Pusat Statistik (BPS), Konstruksi pengukuran ini berlandaskan pada paradigma *basic needs approach*, yang merumuskan kemiskinan sebagai defisiensi kemampuan ekonomis dalam memenuhi ambang batas kebutuhan fundamental. Sebagaimana diuraikan oleh Susanto dan Pangesti (2020), besaran Garis Kemiskinan (GK) merepresentasikan akumulasi total dari nilai Garis Kemiskinan Makanan (GKM) serta Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM). Penggunaan satuan persen dalam variabel ini memungkinkan komparasi tingkat kesejahteraan antarprovinsi secara konsisten, valid, dan *apple-to-apple* sepanjang periode observasi penelitian.

Variabel independen utama, *Financial Deepening* (X1), didefinisikan sebagai kedalaman sektor keuangan yang diprosikan melalui rasio total kredit perbankan (Bank Umum dan BPR) terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku. Pemilihan proksi ini didasarkan pada argumen bahwa kredit domestik ke sektor swasta merupakan indikator paling representatif untuk mengukur fungsi intermediasi lembaga keuangan dalam ekonomi riil. Sebagaimana dijelaskan oleh Pasuhuk (2018), rasio ini menggambarkan seberapa besar likuiditas yang disalurkan kembali ke masyarakat untuk memacu produktivitas. Sugiyanto dan Yolanda (2020) memperkuat rasionalisasi ini dengan menyatakan bahwa semakin tinggi nilai rasio kredit terhadap PDRB, maka semakin dalam sektor keuangan suatu daerah, yang mengindikasikan semakin terbukanya akses pembiayaan bagi masyarakat miskin untuk meningkatkan kesejahteraan.

Selain variabel utama, model estimasi ini mengintegrasikan dua variabel kontrol makroekonomi fundamental, yaitu Pertumbuhan Ekonomi (X2) dan Inflasi (X3), guna meminimalisir bias spesifikasi. Dalam studi ini, variabel pertumbuhan ekonomi diestimasi melalui laju PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 (persen), yang merefleksikan ekspansi nyata *output* atau kapasitas produksi daerah. Sementara itu, variabel Inflasi (X3) didefinisikan sebagai persentase kenaikan harga umum tahunan. Mengingat ketersediaan data agregat inflasi level provinsi yang terbatas pada periode penelitian, variabel ini diprosikan menggunakan data inflasi Ibukota Provinsi. Inklusi kedua variabel ini sangat krusial karena secara teoritis, pertumbuhan output (*income effect*) dan stabilitas harga (*price effect*) merupakan determinan utama yang memengaruhi daya beli riil masyarakat dan kerentanan terhadap kemiskinan. Guna memetakan hubungan kausalitas antar variabel tersebut secara sistematis, kerangka pemikiran penelitian digambarkan melalui Diagram Tulang Ikan (*Fishbone Diagram*). Dalam diagram, Tingkat Kemiskinan diposisikan sebagai akibat (*effect*) dari tiga penyebab utama (*causes*) yaitu aspek pendalaman keuangan, stabilitas harga, dan kinerja *output* riil.

Melalui penerapan metode regresi data panel statis, penelitian ini mengevaluasi pengaruh *Financial Deepening* serta indikator makroekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Spesifikasi model mengakomodasi dimensi seluruh provinsi periode 2011-2024 untuk menangkap heterogenitas serta fluktuasi waktu dengan presisi. Fungsi stokastik hubungan linier dinotasikan di bawah ini. Secara teoritis, koefisien β_1 dan β_2 dihipotesiskan bernilai negatif, sedangkan β_3 diproyeksikan positif terhadap tingkat kemiskinan.

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \epsilon_{it} \dots \text{(Persamaan 1)}$$

Keterangan:

Y_{it}	: Tingkat Kemiskinan di provinsi i pada tahun t
α	: Konstanta / <i>Intercept</i>
β_{123}	: Koefisien Regresi variabel independen
$X1_{it}$: <i>Financial Deepening</i>
$X2_{it}$: Pertumbuhan Ekonomi
$X3_{it}$: Inflasi
ϵ_{it}	: <i>Error term</i> (galat)
i	: Entitas provinsi (<i>cross-section</i>)
t	: Periode waktu (<i>time-series</i>)

Dalam kerangka kerja ekonometrika data panel, penaksiran koefisien regresi dapat dilakukan menggunakan tiga teknik utama: *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM), dan *Random Effect Model* (REM). Perbedaan mendasar ketiganya terletak pada asumsi variasi antar-unit; CEM mengabaikan dimensi waktu dan individu, sedangkan FEM dan REM mengakomodasi perbedaan karakteristik spesifik. Mengacu pada studi Melati & Suryowati (2018), pendekatan FEM sering kali lebih unggul untuk data kewilayahan karena kemampuannya menangkap heterogenitas unit *cross-section* (provinsi) melalui intersep yang berbeda, sehingga bias akibat karakteristik unik tiap wilayah dapat diminimalisir.

Penentuan model estimasi terbaik antara CEM, FEM, atau REM dilakukan melalui prosedur pengujian bertahap untuk menghasilkan estimator yang *Best Linear Unbiased Estimator* (BLUE). Seleksi awal menggunakan Uji Chow untuk memilih antara CEM dan FEM, dengan hipotesis nol (H_0) bahwa model *common effect* lebih tepat. Jika hasil uji menolak H_0 (probabilitas $< \alpha$), analisis berlanjut ke Uji Hausman untuk membandingkan konsistensi antara FEM dan REM. Dalam tahap ini, jika statistik uji signifikan, maka model efek tetap (FEM) dipilih karena dianggap lebih konsisten. Namun, apabila Uji Chow mendukung CEM, maka Uji *Lagrange Multiplier* (LM) diperlukan untuk memverifikasi apakah terdapat efek random yang signifikan dibandingkan metode OLS biasa. Kepatuhan pada alur pengujian ini krusial untuk

menghindari bias spesifikasi yang dapat mendistorsi validitas inferensi kebijakan.

Pasca penetapan model estimasi yang paling optimal, proses analisis berlanjut pada tahap Uji Asumsi Klasik. Langkah ini krusial untuk memverifikasi bahwa parameter yang dihasilkan telah konsisten dengan kaidah *Best Linear Unbiased Estimator* (BLUE). Tahap awal diagnostik dilakukan melalui Uji Multikolinearitas, yang dideteksi berdasarkan matriks korelasi antarvariabel independen maupun nilai *Variance Inflation Factor* (VIF), untuk memastikan tidak ada hubungan linier sempurna yang mengganggu efisiensi estimasi. Selanjutnya, mengingat karakteristik data panel provinsi yang heterogen, Uji Heteroskedastisitas mutlak dilakukan menggunakan *Modified Wald Test* (hanya untuk *Fixed Effect Model*) guna mendeteksi ketidaksamaan varians residual. Terakhir, karena data memuat dimensi waktu (2011-2024), Uji Autokorelasi diterapkan menggunakan metode *Wooldridge Test* untuk mengidentifikasi adanya korelasi serial antar periode waktu. Pengabaian terhadap asumsi-asumsi ini dapat menyebabkan *standard error* menjadi bias dan pengujian hipotesis menjadi tidak valid.

Seluruh tahapan komputasi statistik dan estimasi parameter dalam penelitian ini dieksekusi menggunakan perangkat lunak Stata 15.1 (*Statistics and Data*). Pemilihan *software* ini didasari oleh kapabilitasnya yang superior dalam menangani algoritma regresi data panel yang kompleks serta ketersediaan fitur uji diagnostik yang *robust*. Setelah model terbebas dari masalah asumsi klasik, verifikasi hipotesis dilakukan melalui Uji t (*Partial*) dan Uji F (*Simultan*) pada taraf signifikansi (α) 5%. Uji t ditujukan untuk mengisolasi pengaruh spesifik variabel *Financial Deepening*, Pertumbuhan Ekonomi, dan Inflasi secara individu terhadap kemiskinan. Sementara itu, Uji F berfungsi mengevaluasi eksistensi pengaruh variabel independen secara bersama-sama. Mengacu pada kaidah inferensi statistik, hipotesis alternatif (H_a) akan diterima apabila nilai probabilitas (p -value) yang dihasilkan lebih kecil dari 0,05, yang mengindikasikan adanya dampak signifikan secara statistik.

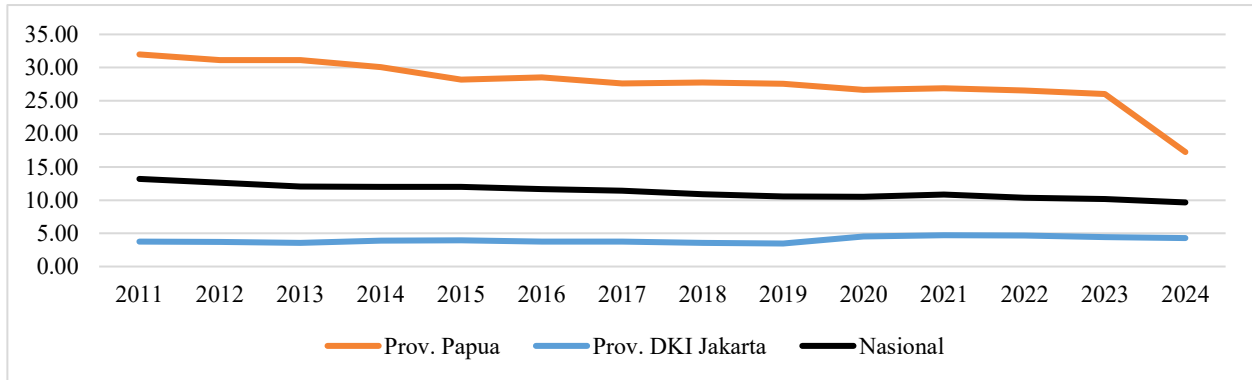
III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

A. Dinamika Kemiskinan dan Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Tingkat kemiskinan di Indonesia masih menjadi tantangan pembangunan yang persisten dengan variasi angka yang cukup

lebar antarwilayah geografis. Selama periode pengamatan 2011-2024, dinamika kemiskinan di 33 provinsi menunjukkan fluktuasi yang dipengaruhi oleh berbagai indikator makroekonomi dan stabilitas sektor keuangan. Berikut adalah gambaran statistik deskriptif dari variabel-variabel yang diamati dalam penelitian ini.



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah oleh penulis (2025)

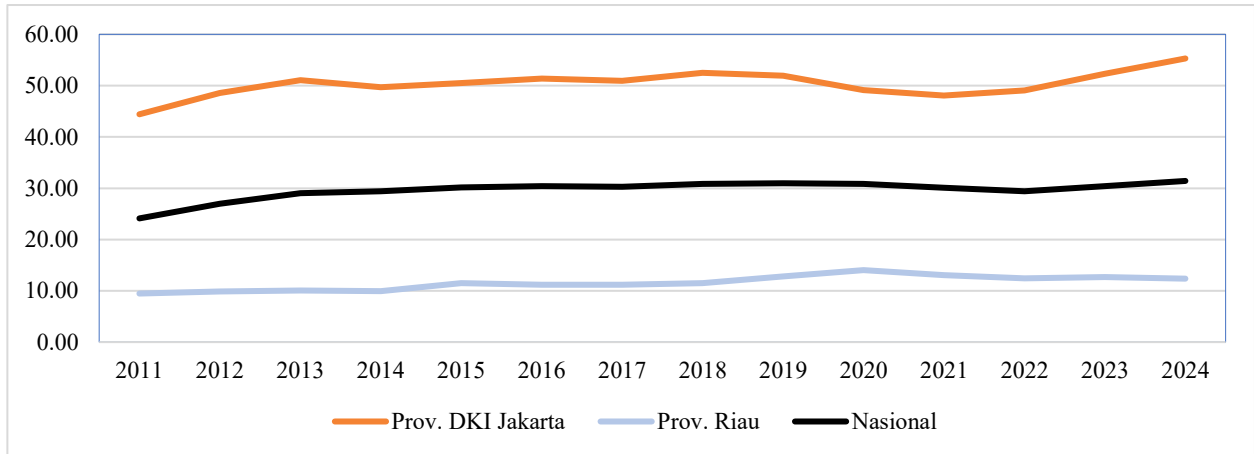
Gambar 1. Tren Kemiskinan di Indonesia: Perbandingan Nilai Maksimum, Minimum, dan Rata-rata Nasional (2011-2024)

Visualisasi data tersebut mengindikasikan adanya disparitas tingkat kemiskinan yang signifikan antarprovinsi di Indonesia sepanjang kurun waktu 2011–2024. Secara rata-rata statistik deskriptif, tingkat kemiskinan tercatat sebesar 11,30 persen, namun terdapat disparitas yang sangat mencolok antarwilayah. Grafik menunjukkan bahwa angka kemiskinan tertinggi sempat menyentuh level ekstrem sebesar 31,98 persen, yang mengindikasikan masih adanya wilayah dengan tantangan kesejahteraan yang berat. Sebaliknya, wilayah dengan performa pengentasan kemiskinan terbaik mencatatkan angka terendah sebesar 3,47 persen. Fluktuasi persentase ini tidak hanya mencerminkan dinamika kesejahteraan yang belum merata, tetapi juga menjadi sinyal penting perlunya

intervensi kebijakan yang spesifik. Tren persentase ini menegaskan urgensi peran sektor keuangan dan stabilitas harga dalam menekan laju angka kemiskinan tersebut.

B. Dinamika dan Disparitas Financial Deepening Antarwilayah

Perkembangan sektor keuangan di Indonesia, yang diukur melalui rasio kredit terhadap PDRB (*financial deepening*), menunjukkan dinamika yang beragam di 33 provinsi. Indikator ini mencerminkan sejauh mana kedalaman akses keuangan masyarakat dan sektor riil dalam memanfaatkan fasilitas perbankan untuk mendorong aktivitas ekonomi. Berikut adalah gambaran tren *financial deepening* selama periode pengamatan.



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Indonesia (BI), diolah oleh penulis (2025)

Gambar 3. Tren *Financial Deepening* di Indonesia: Perbandingan Nilai Maksimum, Minimum, dan Rata-rata Nasional (2011-2024)

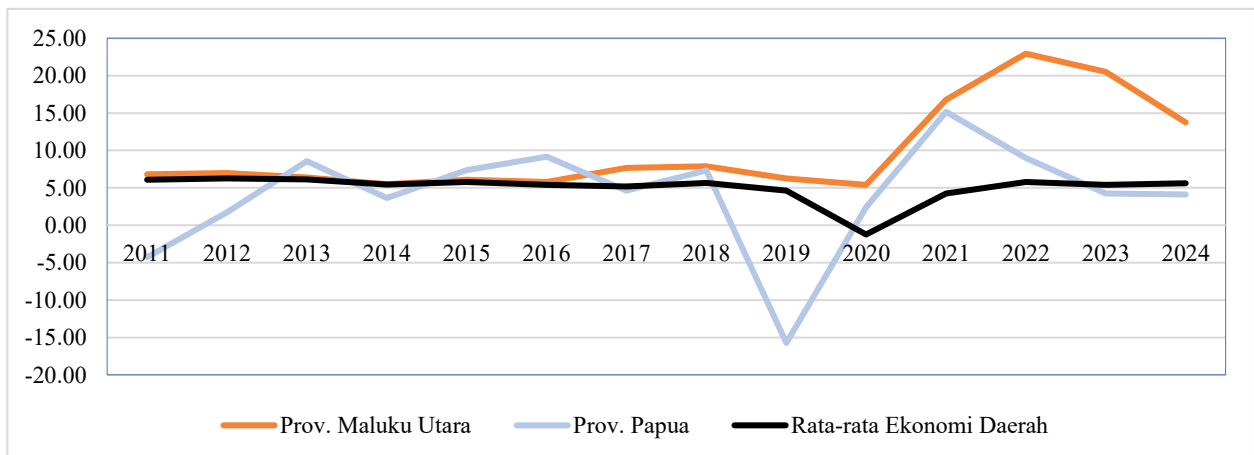
Berdasarkan visualisasi data di atas, tingkat pendalaman keuangan (*financial deepening*) di Indonesia memperlihatkan variasi yang cukup signifikan antarwilayah selama periode penelitian. Secara rata-rata, rasio kredit terhadap PDRB nasional berada di angka 27,65 persen, yang menunjukkan tingkat intermediasi perbankan yang tergolong moderat. Namun, terdapat kesenjangan lebar (*gap*) antarprovinsi, di mana wilayah dengan akses keuangan tertinggi mampu mencapai angka 55,30

persen, sementara wilayah dengan penetrasi terendah hanya mencatatkan 9,47 persen. Disparitas yang mencolok ini mengindikasikan bahwa distribusi kredit perbankan belum merata sepenuhnya ke seluruh pelosok negeri, melainkan masih terkonsentrasi di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi tertentu. Kondisi ketimpangan akses likuiditas ini menjadi tantangan tersendiri dalam upaya mendorong inklusi keuangan yang lebih luas guna memacu pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih seimbang.

C. Gambaran Fluktuasi dan Tren Pertumbuhan Ekonomi Daerah (2011-2024)

Pertumbuhan ekonomi daerah yang diproksikan melalui Laju PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) mencerminkan kinerja produktivitas riil di 33 provinsi

Indonesia. Indikator ini menunjukkan dinamika volatilitas yang cukup tinggi selama periode pengamatan (2011-2024), yang dipengaruhi oleh fluktuasi harga komoditas global serta guncangan eksternal. Berikut adalah visualisasi tren pertumbuhan ekonomi tersebut.



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah oleh penulis (2025)

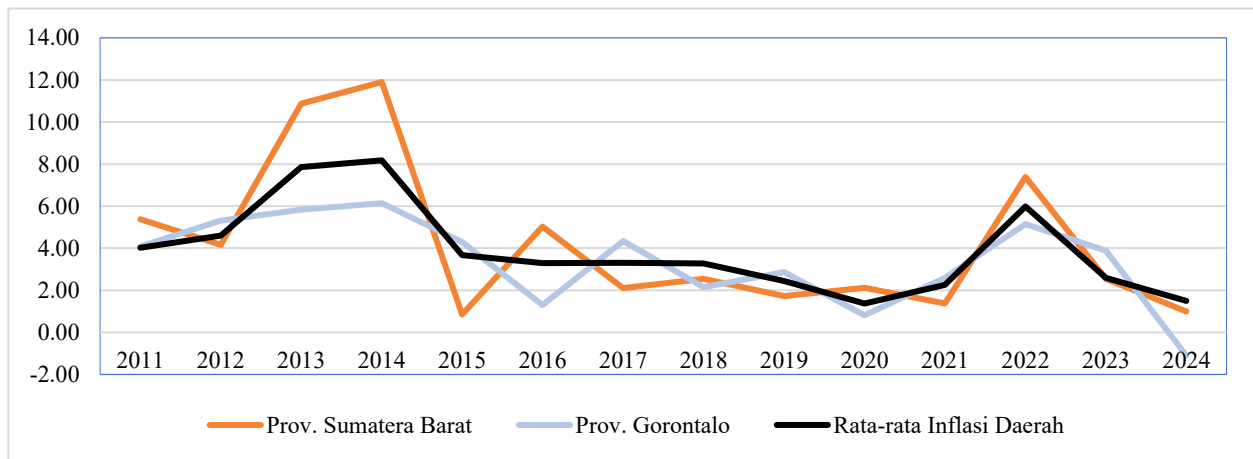
Gambar 4. Tren Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) Tertinggi, Terendah, dan Rata-rata Ekonomi Daerah (2011-2024)

Grafik di atas mengilustrasikan fluktuasi laju pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sangat dinamis selama empat belas tahun terakhir. Secara rata-rata, ekonomi daerah tumbuh sebesar 5,02 persen per tahun, sebuah angka yang moderat bagi negara berkembang. Namun, rentang persentase pertumbuhan tercatat sangat lebar. Terdapat provinsi yang mampu mencatatkan lonjakan kinerja ekonomi fantastis hingga mencapai angka tertinggi 22,94 persen, yang umumnya didorong oleh momentum sektor pertambangan atau industri spesifik. Di sisi lain, kerentanan ekonomi daerah juga terlihat jelas dengan adanya kontraksi pertumbuhan ekstrem hingga menyentuh titik terendah -

15,74 persen (negatif). Penurunan drastis ini mengonfirmasi dampak guncangan krisis yang memukul telak aktivitas produksi di wilayah tertentu, sekaligus menuntut kebijakan mitigasi yang lebih kuat untuk menjaga resiliensi ekonomi daerah ke depan.

D. Dinamika Volatilitas Inflasi dan Tantangan Stabilitas Harga

Stabilitas harga, yang tercermin dari tingkat inflasi, merupakan indikator makroekonomi krusial yang berdampak langsung pada daya beli masyarakat di 33 provinsi. Berikut adalah visualisasi tren pergerakan inflasi daerah selama periode penelitian.



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah oleh penulis (2025)

Gambar 5. Tren Tingkat Inflasi Tertinggi, Terendah, dan Rata-rata Inflasi Daerah (2011-2024)

Berdasarkan grafik di atas, terlihat bahwa laju inflasi di berbagai provinsi Indonesia mengalami fluktuasi yang dinamis merespons kondisi ekonomi global dan domestik. Secara rata-rata, inflasi daerah tercatat sebesar 3,88 persen, yang menunjukkan bahwa secara umum stabilitas harga relatif terkendali dalam rentang sasaran inflasi nasional. Namun, grafik juga merekam adanya guncangan harga (*price shock*) pada tahun-tahun tertentu dimana inflasi melonjak hingga titik tertinggi 11,9 persen, yang memberikan tekanan berat pada pengeluaran rumah tangga. Di sisi lain, terdapat pula periode di mana tekanan harga sangat rendah hingga menyentuh level -1,1 persen. Pola pergerakan ini mengindikasikan pentingnya peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam menjaga ketersediaan

pasokan guna mencegah erosi daya beli masyarakat miskin.

E. Hasil Uji Spesifikasi dan Penentuan Model Estimasi Terbaik

Berdasarkan rangkaian pengujian model melalui uji *Chow* dan *Hausman*, didapati bahwa nilai probabilitas *chi-square* pada uji *Hausman* berada di atas ambang batas 0,05. Temuan statistik ini mengonfirmasi bahwa *Random Effect Model* (REM) merupakan estimator yang lebih efisien dan terpilih sebagai model final melampaui *Fixed Effect Model*. Secara teoritis, penggunaan REM dinilai lebih tepat karena perbedaan karakteristik spesifik antarprovinsi di Indonesia diasumsikan bersifat acak (*random term*) dan tidak berkorelasi langsung dengan variabel independen. Hal ini memungkinkan generalisasi hasil inferensi ke populasi yang

lebih luas. Selain itu, REM memiliki keunggulan efisiensi derajat kebebasan (*degrees of freedom*) yang lebih tinggi dibandingkan FEM, sehingga mampu menghasilkan estimasi parameter yang lebih efisien dalam menjelaskan determinan kemiskinan regional.

F. Hasil Uji Asumsi Klasik dan Validasi Model

Sebelum melakukan estimasi final, validitas model diperiksa melalui uji asumsi klasik. Dengan capaian nilai rata-rata *Variance Inflation Factor* (VIF) pada level 1,04, model terbukti bebas dari gangguan multikolinearitas mengingat angka tersebut masih jauh di bawah batas toleransi maksimum 10. Namun, uji *Wooldridge* mendeteksi adanya masalah autokorelasi ($Prob < 0,05$), serta indikasi heteroskedastisitas yang kerap ditemui pada data panel dinamis. Mengingat penggunaan *Random Effect Model* (REM) rentan terhadap bias jika asumsi ini dilanggar, maka solusi korektif dilakukan menggunakan pendekatan

Clustered Robust Standard Errors berdasarkan entitas provinsi. Teknik ini secara efektif mengoreksi standard error agar kebal (robust) terhadap gangguan autokorelasi dan heteroskedastisitas tanpa mengubah koefisien regresi, sehingga menghasilkan nilai signifikansi statistik yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

G. Hasil Estimasi Regresi Data Panel dan Uji Kelayakan Model

Berdasarkan serangkaian pengujian model yang telah dilakukan, tabel berikut menyajikan hasil estimasi final menggunakan *Random Effect Model* (REM) yang telah dikoreksi dengan *Cluster Robust Standard Errors* untuk mengatasi masalah autokorelasi dan heteroskedastisitas. Secara matematis, spesifikasi persamaan regresi yang dihasilkan oleh model tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha - 0.1959X1_{it} - 0.0123X2_{it} + 0.1317X3_{it} + e_{it}$$

(Persamaan 2)

Tabel 1. Hasil Estimasi *Random Effect Model* (Robust)

Variabel Independen	Koefisien	Std. Error	Prob.	Keterangan
Constant (α)	16.266	2.130129	0.000	-
Financial Deepening	-0.1959	0.0501691	0.000	Signifikan
Pertumbuhan Ekonomi	-0.0123	0.0184374	0.505	Tidak Signifikan
Inflasi	0.1317	0.0284771	0.000	Signifikan
Diagnostik Model				
$Prob > Chi2$	0.0000			Layak (<i>Fit</i>)
R -Squared (<i>Overall</i>)	0.0844			
Jumlah Observasi	462			
Jumlah Grup (Provinsi)	33			

Sumber: Data diolah menggunakan Stata 15, 2025.

Mengacu pada hasil estimasi *Random Effect Model* dengan *Robust Standard Errors* (Tabel 1), tercatat nilai probabilitas ($Prob > chi2$) sebesar 0,0000. Mengingat nilai statistik tersebut berada di bawah taraf nyata $\alpha = 0,05$, dapat disimpulkan bahwa variabel *Financial Deepening*, *Pertumbuhan Ekonomi*, dan *Inflasi* secara simultan memberikan kontribusi signifikan terhadap tingkat kemiskinan di 33 provinsi selama periode 2011–2024. Dengan demikian, model regresi ini dinyatakan layak (*fit*) untuk digunakan dalam analisis selanjutnya. Selain itu, nilai koefisien determinasi (R^2) *overall* tercatat sebesar 0,0844, yang mengindikasikan bahwa ketiga variabel independen dalam model

mampu menjelaskan variasi naik-turunnya tingkat kemiskinan sebesar 8,44 persen, Sementara itu, sisa variabilitas sebesar 91,56 persen dipengaruhi oleh determinan lain yang tidak tercakup dalam spesifikasi model estimasi ini.

Pembahasan

A. Pengaruh *Financial Deepening* terhadap Kemiskinan

Temuan empiris mengindikasikan bahwa *financial deepening* berpengaruh negatif dan nyata terhadap tingkat kemiskinan, yang ditunjukkan dengan capaian koefisien regresi pada level -0,1959. Temuan empiris ini mengonfirmasi bahwa peningkatan rasio

kredit perbankan terhadap PDRB efektif dalam mereduksi persentase penduduk miskin di tingkat provinsi. Secara teoritis, kedalaman sektor keuangan bekerja melalui mekanisme relaksasi kendala likuiditas (*liquidity constraints*). Akses terhadap lembaga keuangan formal memungkinkan rumah tangga miskin untuk memitigasi risiko ekonomi serta memuluskan pola konsumsi (*consumption smoothing*) saat menghadapi guncangan pendapatan. Lebih lanjut, aksesibilitas terhadap pembiayaan produktif berperan krusial dalam menstimulasi akumulasi modal manusia khususnya melalui investasi pendidikan dan kesehatan yang menjadi fondasi utama bagi peningkatan produktivitas serta pendapatan jangka panjang.

Dalam perspektif ekonomi mikro dan sektoral, peran intermediasi perbankan sangat vital dalam mendorong pertumbuhan yang inklusif (*pro-poor growth*). Fenomena penguatan *financial deepening* menandakan bekerjanya fungsi intermediasi dalam mengalirkan modal ke sektor potensial, utamanya UMKM. Mengingat karakteristik pasar tenaga kerja domestik yang bertumpu pada sektor tersebut, akses pembiayaan yang lebih luas memberikan implikasi ganda. Hal ini tidak hanya memacu produktivitas sektoral, tetapi juga berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja dan apresiasi upah riil bagi segmen tenaga kerja berpendidikan rendah. Dengan demikian, pendalaman finansial memperbaiki distribusi pendapatan dengan memberikan peluang bagi kelompok masyarakat bawah untuk berpartisipasi aktif dalam aktivitas ekonomi pasar.

Meskipun hasil regresi menunjukkan dampak signifikan dalam penurunan kemiskinan, efektivitas *financial deepening* sangat bergantung pada kualitas inklusi keuangan di masing-masing provinsi. Tantangan utama yang dihadapi adalah disparitas spasial dan asimetri informasi yang seringkali menyebabkan perbankan enggan menyalurkan kredit ke daerah terpencil atau kelompok masyarakat yang tidak memiliki agunan (*non-bankable*). Jika pendalaman keuangan hanya terkonsentrasi pada korporasi besar di pusat pertumbuhan, maka dampaknya

terhadap pengentasan kemiskinan akan terbatas. Oleh karena itu, kebijakan yang mengarahkan alokasi kredit pada sektor padat karya serta inovasi teknologi finansial diperlukan untuk menembus hambatan geografis. Hal ini penting untuk memastikan bahwa manfaat stabilitas sektor keuangan dapat dinikmati secara merata dan tidak memperlebar ketimpangan pendapatan (Zhang & Naceur, 2019).

B. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) terhadap Kemiskinan

Temuan empiris mengindikasikan bahwa Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) tidak memiliki dampak yang nyata terhadap angka kemiskinan di 33 provinsi Indonesia. Hal ini dikonfirmasi oleh nilai probabilitas sebesar 0,505 yang melampaui taraf signifikansi, meskipun koefisien regresi menunjukkan arah negatif (-0,0123). Temuan empiris ini menolak hipotesis yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi secara otomatis akan menurunkan kemiskinan. Tidak signifikan secara statistik ini mengindikasikan bahwa kuantitas pertumbuhan ekonomi semata tidak cukup untuk mengentaskan kemiskinan jika tidak dibarengi dengan kualitas pertumbuhan yang inklusif. Dalam literatur ekonomi pembangunan, fenomena ini menegaskan bahwa komposisi sektoral dari pertumbuhan ekonomi memegang peranan yang jauh lebih krusial dibandingkan sekadar angka agregat pertumbuhan itu sendiri. Dampak pertumbuhan ekonomi terhadap penurunan kemiskinan ditentukan oleh karakteristik sektoralnya. Pertumbuhan tersebut hanya akan efektif jika digerakkan oleh sektor *labor-intensive*, khususnya pertanian dan industri pengolahan, yang mengakomodasi tenaga kerja dari kelompok berpendapatan rendah, dibandingkan pertumbuhan yang didominasi oleh sektor padat modal.

Lebih lanjut, tidak signifikannya pengaruh PDRB terhadap penurunan kemiskinan menjadi bukti empiris lemahnya mekanisme *trickle-down effect* di tingkat regional Indonesia selama periode pengamatan. Pertumbuhan ekonomi di banyak provinsi kemungkinan besar didominasi oleh sektor ekstraktif dan pertambangan (*capital intensive*) yang memiliki nilai tambah tinggi

namun minim penyerapan tenaga kerja lokal. Akibatnya, manfaat ekonomi hanya terakumulasi pada pemilik modal dan kelompok berpendapatan tinggi, sementara masyarakat miskin yang umumnya memiliki keterbatasan keterampilan (*low-skilled labor*) tidak dapat berpartisipasi dalam kue pembangunan tersebut. Fosu (2017) menyoroti bahwa tingkat ketimpangan awal (*initial inequality*) yang tinggi di suatu wilayah dapat menjadi penghambat utama transmisi pertumbuhan ekonomi ke pengentasan kemiskinan. Ketika pertumbuhan ekonomi tidak disertai dengan pemerataan akses kesempatan kerja, maka peningkatan PDRB setinggi apapun tidak akan mampu mengoreksi angka kemiskinan secara statistik, melainkan justru memperlebar jurang disparitas pendapatan antarpenduduk.

C. Pengaruh Inflasi terhadap Kemiskinan

Berdasarkan uji hipotesis, terbukti bahwa tingkat kemiskinan dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh inflasi, sebagaimana ditunjukkan oleh nilai koefisien estimasi sebesar 0,1317. Temuan ini mengindikasikan bahwa setiap kenaikan laju inflasi sebesar 1 persen akan mendorong peningkatan angka kemiskinan sebesar 0,13 persen, *ceteris paribus*. Secara empiris, hasil ini sejalan dengan pandangan bahwa inflasi bertindak sebagai pajak regresif yang membebani masyarakat berpendapatan rendah lebih berat dibandingkan kelompok kaya. Inflasi yang tidak terkendali secara langsung menurunkan pendapatan riil (*real wages*) dan aset finansial masyarakat miskin yang umumnya memegang uang tunai dan tidak memiliki mekanisme lindung nilai (*hedging*) terhadap kenaikan harga. Akibatnya, stabilitas harga menjadi prasyarat mutlak dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Dampak inflasi terhadap kemiskinan di Indonesia sangat sensitif karena struktur pengeluaran rumah tangga miskin yang didominasi oleh konsumsi pangan. Kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK), khususnya pada kelompok bahan makanan (*volatile food*), akan langsung menggeser Garis Kemiskinan (GK) ke atas. Ketika harga kebutuhan pokok melonjak, daya beli rumah

tangga yang berada sedikit di atas garis kemiskinan (*near poor*) akan tergerus drastis, menyebabkan mereka jatuh ke dalam kategori miskin. Fenomena ini menunjukkan bahwa inflasi tidak hanya memperdalam tingkat keparahan kemiskinan bagi mereka yang sudah miskin, tetapi juga meningkatkan kerentanan sosial bagi kelompok masyarakat yang sebelumnya tidak miskin, sehingga memperluas basis kemiskinan secara agregat di suatu wilayah.

Implikasi kebijakan dari temuan ini menyoroti urgensi pengendalian inflasi dari sisi penawaran (*cost-push inflation*), terutama distribusi pangan antardaerah. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak akan efektif menurunkan kemiskinan jika dibarengi dengan laju inflasi yang tinggi, karena efek harga akan menganulir kenaikan pendapatan nominal yang diterima masyarakat. Dalam konteks ini, eksistensi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) memegang posisi fundamental untuk memastikan kontinuitas ketersediaan suplai dan stabilitas harga di tingkat konsumen. Kegagalan dalam memitigasi guncangan harga tidak hanya berdampak pada indikator makroekonomi, tetapi juga berpotensi meningkatkan biaya fiskal pemerintah melalui pembengkakan anggaran bantuan sosial dan jaring pengaman sosial untuk menjaga konsumsi masyarakat terdampak.

IV. KESIMPULAN

Mengacu pada hasil analisis empiris yang mendayagunakan *Random Effect Model*, studi ini menarik simpulan bahwa *financial deepening* dan inflasi terbukti menjadi determinan signifikan bagi tingkat kemiskinan di 33 provinsi Indonesia selama periode 2011–2024. Pendalaman sektor keuangan terbukti efektif menurunkan kemiskinan melalui mekanisme transmisi kredit produktif, sedangkan inflasi memiliki dampak positif yang memperburuk kondisi kemiskinan akibat penurunan daya beli riil. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi (PDRB) tidak menunjukkan pengaruh signifikan, mengindikasikan bahwa pertumbuhan yang terjadi bersifat tidak inklusif dan gagal menciptakan efek rembesan (*trickle-down*

effect) bagi masyarakat bawah. Temuan ini menegaskan bahwa pengentasan kemiskinan memerlukan sinergi kebijakan antara stabilitas harga dan perluasan akses keuangan, bukan sekadar mengejar target pertumbuhan makroekonomi semata.

V. SARAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan temuan empiris, penelitian ini merekomendasikan reorientasi kebijakan pembangunan makroekonomi daerah melalui tiga prioritas utama yang lebih operasional dan terukur:

A. Optimalisasi *Financial Deepening* yang Pro-UMKM

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Bank Pembangunan Daerah (BPD) disarankan merelaksasi persyaratan agunan Kredit Usaha Rakyat (KUR) mikro dan memperluas layanan *branchless banking* di wilayah dengan kemiskinan persisten. Indikator keberhasilan kebijakan ini adalah peningkatan proporsi penyaluran kredit UMKM minimal 30% dari total kredit daerah. Namun, mengingat ekspansi ini berisiko meningkatkan rasio kredit bermasalah (*Non-Performing Loan/NPL*), implementasinya mutlak harus diimbangi dengan program pendampingan literasi keuangan dan skema penjaminan kredit oleh pemerintah daerah.

B. Pengendalian Inflasi Berbasis Intervensi Rantai Pasok

Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) perlu menggeser fokus dari sekadar pemantauan harga menjadi intervensi langsung, seperti penggunaan APBD untuk subsidi ongkos logistik distribusi pangan bergejolak (*volatile food*). Keberhasilan langkah ini diukur dari kemampuan daerah menahan laju inflasi pangan pada rentang target nasional ($\pm 3\%$) untuk melindungi daya beli masyarakat rentan. Tantangan utamanya adalah keterbatasan ruang fiskal daerah, sehingga intervensi harus dilakukan secara taktis, terukur, dan tepat waktu agar tidak menimbulkan inefisiensi maupun distorsi pasar.

C. Reorientasi Investasi pada Sektor Padat Karya

Untuk mengatasi pertumbuhan ekonomi yang tidak inklusif, pemerintah daerah perlu

mengubah rezim insentif investasi dari sektor padat modal menuju sektor padat karya (*labor-intensive*) seperti hilirisasi pertanian. Target capaian kebijakan ini adalah meningkatnya angka elastisitas kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi serta menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) lokal. Meskipun pergeseran ini berisiko memperlambat laju PDRB nominal secara jangka pendek, langkah ini sangat strategis untuk memastikan terciptanya *trickle-down effect* yang mendistribusikan manfaat pembangunan langsung kepada kelompok masyarakat berpendapatan rendah.

VI. REFERENSI

- Aryati, A., Junaidi, J., & Putra, R. A. (2023). Financial development and economic growth: Evidence from Indonesia before and after the COVID-19 pandemic. *Economy of Regions*, 19(4), 1263-1274. <https://doi.org/10.17059/ekon.reg.2023-4-23>
- Astutik, Y., & Nugroho, R. Y. Y. (2024). The effect of financial deepening on economic growth in Indonesia. Signifikan: *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 13(2), 327-346. <https://doi.org/10.15408/sjie.v13i2.41998>
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2024*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Produk Domestik Regional Bruto Provinsi-Provinsi di Indonesia Menurut Lapangan Usaha 2011-2024*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Statistik Indonesia 2024*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Bank Indonesia. (2024). *Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia (SEKI)*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Ekaputri, R. A., Sukiyono, K., Yefriza, Y., Febriani, R. E., & Nopiah, R. (2025). Gendered dimensions of poverty in Indonesia: A study of financial inclusion and the influence of female-

- headed households. *Economies*, 13(8), 240.
<https://doi.org/10.3390/economies13080240>
- Fakhrulrizqi, M. R., & Nuraulia, S. (2025). Pengaruh inklusi keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan, dan kemiskinan: Pendekatan spasial antar provinsi di Indonesia. *Journal of Analytical Research, Statistics and Computation*, 4(1).
- Florennica, E., & Febriani, R. E. (2023). Do financial deepening, government spending, and unemployment benefit poverty reduction in Indonesia? *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 20(2), 193-204.
<https://doi.org/10.29259/jep.v20i2.18610>
- Fosu, A. K. (2017). Growth, Inequality, and Poverty Reduction in Developing Countries: Recent Global Evidence. *Research in Economics*, 71(2), 306-336.
<https://doi.org/10.1016/j.rie.2016.05.005>
- Gujarati, D. N. (2004). *Basic Econometrics* (4th ed.). The McGraw-Hill Companies.
- Kamsina, S., & Khoirudin, R. (2024). Determinan kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. *Jurnal Genesis Indonesia*, 3(1), 15-24.
<https://doi.org/10.56741/jgi.v3i01.477>
- Melati, I., & Suryowati, K. (2018). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Statistika Industri dan Komputasi*, 3(1), 1-10.
- Miranda, & Rafiqi, I. (2025). Pengaruh perbankan syariah terhadap financial deepening di Indonesia dengan inflasi sebagai variabel moderating. *Journal of Sharia Economics*, 7(1), 1-16.
- Ningsih, D., & Andiny, P. (2018). Analisis pengaruh inflasi dan pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Samudra Ekonomika*, 2(1), 53-61.
- Nuryitmawan, T. R. (2021). The impact of credit on multidimensional poverty in rural areas: A case study of the Indonesian agricultural sector. *Agriecobis (Journal of Agricultural Socioeconomics and Business)*, 4(1), 32-45.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *Statistik Perbankan Indonesia*. Jakarta: Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan OJK.
- Pasuhuk, P. M. (2018). Contribution of financial depth and financial access to poverty reduction in Indonesia. *Bulletin of Monetary Economics and Banking*, 21(1), 95-122.
<https://doi.org/10.21098/bemp.v21i1.892>
- Permana, H., & Pasaribu, E. (2023). Pengaruh inflasi, IPM, UMP dan PDRB terhadap kemiskinan di Pulau Sumatera. *JIMEA | Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)*, 7(3).
- Pratama, I. S. (2020). Analisis pertumbuhan ekonomi inklusif di Indonesia: Pendekatan panel data tingkat provinsi. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 20(2), 145-162.
- Rizkiyah, T. F., & Nidar, S. R. (2022). Apakah peningkatan kredit Bank Perkreditan Rakyat dan peran UMKM dapat menurunkan tingkat kemiskinan? *Journal Image*, 11(1), 1-13.
- Setyani, A. I., & Sugiarto. (2021). Determinan kemiskinan multidimensi kabupaten/kota di Kawasan Timur Indonesia menggunakan geographically weighted regression. *Jurnal Statistika dan Aplikasinya*, 5(2), 121-132.
- Sipahutar, M. A., Oktaviani, R., Siregar, H., & Juanda, B. (2016). Effects of credit on economic growth, unemployment and poverty. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 17(1), 37-49.
- Sitorus, Y. M., & Yuliana, L. (2018). Penerapan Regresi Data Panel pada Analisis Pengaruh Infrastruktur

- terhadap Produktivitas Ekonomi Provinsi-Provinsi di Luar Pulau Jawa Tahun 2010-2014. *Media Statistika*, 11(1), 1–15. <https://doi.org/10.14710/medstat.11.1.1-15>
- Sugiyanto, C., & Yolanda, Z. (2020). The effect of financial deepening on economic growth, inequality, and poverty: Evidence from 73 countries. *South East European Journal of Economics and Business*, 15(2), 15–27. <https://doi.org/10.2478/jeb-2020-0012>
- Susanto, R., & Pangesti, I. (2020). Pengaruh inflasi dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. *Journal of Applied Business and Economics (JABE)*, 7(2), 271–278.
- Zhang, R., & Naceur, S. B. (2019). Financial Development, Inequality, and Poverty: Some International Evidence. *International Review of Economics & Finance*, 61, 1–16. <https://doi.org/10.1016/j.iref.2018.12.015>